



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 2435-2444

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kantanan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol

Jefri Polinggapo^{1✉}, Syamsiar I. Mahmud²

(1) Universitas Gorontalo, (2) STISIPOL Mujahidin

Email: jefripolinggapo03@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kebutuhan akan perumahan layak huni merupakan kebutuhan dasar manusia yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membangun atau memperbaiki rumah agar memenuhi standar rumah layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program BSPS di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi memengaruhi efektivitas program. Kendala utama meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang teknis program, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, serta hambatan administratif di tingkat kabupaten. Meskipun program ini memberikan hasil positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan perbaikan dalam aspek komunikasi, penguatan sumber daya, dan penyederhanaan birokrasi untuk mencapai efektivitas yang lebih baik.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, BSPS, Perumahan Layak Huni, Desa Kantanan*

Abstract

The need for decent housing is a basic human need that is important to improve the quality of life. The Indonesian government through the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) launched the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) to help low-income communities (MBR) build or repair houses to meet the standards of decent housing. This study aims to analyze the implementation of the BSPS Program in Kantanan Village, Bokat District, Buol Regency, with a qualitative descriptive approach based on Edward III's policy implementation theory. The results of the study indicate that communication mechanisms, resources, implementer dispositions, and bureaucratic structures affect the effectiveness of the program. The main obstacles include the low understanding of the community about the technicalities of the program, limited human and financial resources, and administrative obstacles at the district level. Although this program has provided positive results in improving community welfare, improvements are needed in aspects of communication, strengthening resources, and simplifying the bureaucracy to achieve better effectiveness.

Keywords: Implementation, Policy, BSPS, Decent Housing, Kantanan Village

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan perumahan yang layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mengatasi masalah perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu program yang dilaksanakan untuk mendukung hal ini adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam membangun atau memperbaiki rumah secara swadaya agar memenuhi standar rumah layak huni.

Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol merupakan salah satu desa yang menjadi sasaran program BSPS. Sebagai wilayah dengan tingkat perekonomian yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, banyak masyarakat di desa ini yang menghadapi kendala dalam menyediakan rumah yang layak. Dengan adanya program BSPS, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang aman, sehat, dan nyaman.

Namun, dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, pemahaman masyarakat tentang teknis pembangunan, dan koordinasi antar pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai implementasi program ini untuk mengevaluasi sejauh mana program BSPS telah berhasil

mencapai tujuannya di Desa Kantanan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan.

Dalam memahami implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), diperlukan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar yang mendukung pelaksanaan program tersebut.

Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2018), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks BSPS, kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Implementasi kebijakan melibatkan berbagai tahap, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Teori Implementasi Kebijakan

Edward III (1980) mengidentifikasi empat faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi: Informasi harus disampaikan secara jelas kepada semua pihak yang terlibat.
2. Sumber Daya: Tersedianya dana, tenaga kerja, dan sarana yang memadai.
3. Disposisi: Sikap dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan.
4. Struktur Birokrasi: Sistem dan prosedur yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

Faktor-faktor ini sangat relevan untuk mengkaji keberhasilan implementasi program BSPS di Desa Kantanan.

Swadaya Masyarakat

Swadaya adalah partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Program BSPS menekankan pendekatan swadaya dengan memberikan bantuan stimulan yang diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan atau rehabilitasi rumah mereka.

Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Program BSPS merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas perumahan rakyat. Program ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Tujuan utama program ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

2. Memberdayakan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan perumahan.
3. Mendukung pengentasan kemiskinan melalui penyediaan hunian yang layak.

Pelaksanaan program melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, fasilitator lapangan, dan masyarakat penerima manfaat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. Data yang diperoleh berupa informasi mendalam tentang proses pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Penelitian dilakukan di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, yang merupakan salah satu wilayah sasaran Program BSPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Kantanan

Desa Kantanan terletak di Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.200 jiwa. Desa ini merupakan salah satu penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dilaksanakan untuk mendukung pengentasan kemiskinan melalui perbaikan infrastruktur perumahan yang layak huni.

Implementasi Program BSPS di Desa Kantanan

Implementasi Program BSPS di Desa Kantanan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang mencakup empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi Program BSPS melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, fasilitator, dan masyarakat penerima manfaat. Mekanisme komunikasi yang dilakukan adalah:

- Sosialisasi: Pemerintah desa bersama fasilitator mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk menjelaskan tujuan, syarat, dan mekanisme pelaksanaan program.
- Penyebaran Informasi: Informasi terkait program disampaikan melalui media lokal dan pengumuman di balai desa.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam komunikasi, seperti rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap teknis pelaksanaan program. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan dalam pengumpulan dokumen persyaratan.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi Program BPS meliputi sumber daya manusia, finansial, dan material:

- Sumber Daya Manusia: Fasilitator lapangan dan aparat desa berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program. Namun, jumlah fasilitator yang terbatas menjadi kendala dalam pendampingan intensif.
- Sumber Daya Finansial: Dana stimulan yang diberikan pemerintah cukup membantu penerima manfaat. Namun, sebagian masyarakat menghadapi kesulitan dalam menyediakan dana tambahan untuk menyelesaikan pembangunan rumah.
- Sumber Daya Material: Material bangunan disediakan melalui kerja sama dengan toko lokal. Beberapa kendala muncul terkait keterlambatan pengiriman material, yang berdampak pada proses pembangunan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi program. Di Desa Kantanan:

- Kepatuhan Aparat: Aparat desa menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung program.
- Penerimaan Masyarakat: Sebagian besar masyarakat menyambut baik program ini, tetapi terdapat beberapa penerima manfaat yang kurang antusias karena keterbatasan kemampuan finansial mereka.
- Motivasi Fasilitator: Fasilitator lapangan memiliki dedikasi tinggi meskipun menghadapi tantangan berupa beban kerja yang cukup besar.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program BPS mencakup mekanisme dan prosedur yang diterapkan. Di Desa Kantanan, struktur birokrasi dirancang untuk mempermudah pelaksanaan program, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Prosedur Pendaftaran: Proses pendaftaran dibuat sederhana untuk memudahkan masyarakat.

- Koordinasi Antar Lembaga: Pemerintah desa bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran program.
- Pemantauan dan Evaluasi: Pemantauan dilakukan oleh fasilitator untuk memastikan pembangunan rumah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Namun, struktur birokrasi ini masih menghadapi kendala, seperti lambatnya alur administrasi di tingkat kabupaten, yang menyebabkan penundaan pencairan dana.

Pembahasan

Komunikasi

Berdasarkan analisis di atas, implementasi Program BSPS di Desa Kantanan menunjukkan keberhasilan dalam beberapa aspek, seperti komunikasi awal dan motivasi pelaksana. Sebagaimana hasil penelitian (Sarwono, 2022). Sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara langsung memungkinkan mereka untuk lebih memahami tujuan dan manfaat dari program BSPS. Hasil penelitian yang relevan dengan keberhasilan dalam sosialisasi menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas dan terbuka dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan mempercepat adopsi program. Namun, terdapat kendala yang perlu diperhatikan, terutama dalam aspek sumber daya. Sutanto, Rachmawati (2020) menemukan bahwa kendala dalam pemahaman teknis dan keterbatasan sumber daya manusia sering kali memperlambat pelaksanaan program bantuan sosial.

Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam implementasi Program BSPS di Desa Kantanan meliputi fasilitator lapangan dan aparat desa. Fasilitator lapangan memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat terkait pelaksanaan teknis program. Begitu pula aparat desa yang membantu mengkoordinasikan pelaksanaan program di tingkat lokal. Namun, jumlah fasilitator yang terbatas menjadi salah satu kendala utama dalam memberikan pendampingan yang intensif kepada masyarakat. Keterbatasan jumlah fasilitator berpotensi mengurangi efektivitas komunikasi antara pemerintah dan penerima manfaat, serta menghambat proses pelaksanaan program yang membutuhkan pemahaman teknis yang baik dari masyarakat. Menurut Khusna & Rudianto (2021), kesuksesan pelaksanaan program sosial bergantung pada ketersediaan fasilitator yang cukup untuk melakukan pendampingan intensif, terutama dalam program yang memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Penelitian oleh Widodo dan Jati (2021) menunjukkan bahwa kendala sumber daya dan birokrasi yang tidak efisien berpotensi mengurangi efektivitas program pemerintah, termasuk program BSPS.

Sumber Daya Anggaran

Program BSPS menyediakan dana stimulan yang cukup membantu penerima manfaat dalam membangun atau merenovasi rumah. Meskipun dana tersebut dapat mencakup sebagian besar biaya pembangunan, beberapa masyarakat mengalami kesulitan dalam menyediakan dana tambahan untuk menyelesaikan pembangunan rumah mereka. Kendala ini sering kali muncul akibat rendahnya daya beli masyarakat atau kurangnya akses ke sumber pembiayaan lainnya. Penelitian oleh Wahyuni & Supriatna (2022) menunjukkan bahwa meskipun bantuan finansial dari pemerintah dapat mencakup sebagian besar biaya, kesulitan dalam memenuhi kekurangan dana masih menjadi hambatan signifikan dalam keberhasilan program BSPS, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini mengarah pada perlunya pendekatan pembiayaan yang lebih fleksibel dan akses ke kredit mikro atau sumber dana lain yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kekurangan dana.

Sumber Daya Material

Sumber daya material dalam Program BSPS meliputi penyediaan material bangunan yang disalurkan melalui kerja sama dengan toko lokal. Penyediaan material dari sumber lokal dapat mempermudah proses pengadaan dan mengurangi biaya transportasi. Namun, kendala terkait keterlambatan pengiriman material menjadi masalah yang cukup signifikan dalam implementasi program ini. Keterlambatan pengiriman material dapat memperlambat proses pembangunan rumah, sehingga mengganggu jadwal yang telah ditetapkan. Menurut Putri & Yuliana (2020), kendala dalam pengiriman material yang tidak tepat waktu dapat menyebabkan terjadinya penundaan dalam pembangunan rumah yang pada akhirnya berdampak pada keterlambatan dalam menyelesaikan program.

Disposisi

Disposisi meliputi sikap, motivasi, dan komitmen individu atau kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan program. Keberhasilan implementasi kebijakan di Desa Kantanan dipengaruhi oleh beberapa aspek disposisi berikut:

1. Kepatuhan Aparat Desa

Aparat desa menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung pelaksanaan Program BSPS. Hal ini mencerminkan sikap positif aparat terhadap kebijakan, yang sesuai dengan teori implementasi kebijakan oleh Edward III (1980). Edward menyatakan bahwa sikap positif pelaksana kebijakan dapat memengaruhi efektivitas program karena mereka akan bekerja secara optimal dalam mewujudkan tujuan kebijakan.

2. Penerimaan Masyarakat

Sebagian besar masyarakat Desa Kantanan menyambut baik program ini. Namun, keterbatasan kemampuan finansial menyebabkan beberapa penerima manfaat kurang antusias dalam memanfaatkan program. Menurut penelitian Wahyudi (2021), penerimaan masyarakat terhadap kebijakan sering kali bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat langsung dan memenuhi kebutuhan mereka. Keterbatasan finansial dapat menjadi hambatan dalam memanfaatkan manfaat kebijakan secara optimal.

3. Motivasi Fasilitator

Fasilitator lapangan memiliki dedikasi tinggi meskipun menghadapi tantangan berupa beban kerja yang besar. Dedikasi ini menunjukkan sikap profesionalisme yang berkontribusi positif terhadap keberhasilan program. Menurut penelitian oleh Susilo & Handayani (2020), motivasi yang tinggi dari pelaksana kebijakan, seperti fasilitator, adalah salah satu faktor utama keberhasilan program sosial, meskipun mereka sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan beban kerja yang berat.

SIMPULAN

Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kantanan, berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Mekanisme komunikasi yang melibatkan pemerintah desa, fasilitator, dan masyarakat telah dilakukan melalui sosialisasi dan penyebaran informasi. Namun, kendala berupa rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap teknis program mempengaruhi kelancaran proses, terutama dalam pengumpulan dokumen persyaratan.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia, finansial, dan material menjadi pilar penting dalam pelaksanaan program. Komitmen aparat desa dan fasilitator lapangan sangat mendukung program ini, meskipun jumlah fasilitator yang terbatas menjadi kendala dalam pendampingan. Dari sisi finansial, dana stimulan membantu masyarakat, tetapi keterbatasan kemampuan finansial penerima manfaat menghambat penyelesaian pembangunan. Masalah keterlambatan pengiriman material juga berdampak pada keberlanjutan pembangunan rumah.

3. Disposisi

Sikap positif pelaksana kebijakan, seperti kepatuhan aparat desa dan dedikasi fasilitator lapangan, berperan besar dalam mendukung keberhasilan program. Penerimaan masyarakat terhadap program cukup baik, tetapi sebagian penerima manfaat menghadapi hambatan karena keterbatasan finansial.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dirancang untuk mendukung kemudahan pelaksanaan program melalui prosedur yang sederhana dan koordinasi antar lembaga. Namun, masalah administrasi di tingkat kabupaten menyebabkan keterlambatan pencairan dana, yang mempengaruhi waktu pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, implementasi Program BSPS di Desa Kantanan telah menunjukkan hasil yang positif, dengan dukungan kuat dari aparat desa dan fasilitator, serta penerimaan masyarakat yang cukup baik. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan perbaikan dalam aspek komunikasi, penguatan sumber daya manusia, dan pengelolaan struktur birokrasi untuk mengatasi berbagai kendala yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Edward III, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Herzberg, F. (1968). *Work and the Nature of Man*. World Publishing Company.
- Khusna, N., & Rudianto, A. (2021). Pentingnya Peran Fasilitator dalam Kesuksesan Program Sosial: Studi Kasus pada Program Bantuan Sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 45-55.
- Putri, D., & Yuliana, R. (2020). Analisis Kendala Pengadaan Material dalam Pelaksanaan Program Perumahan Bersubsidi. *Jurnal Manajemen dan Teknik Bangunan*, 12(1), 87-95.
- Sarwono, S. (2022). Komunikasi Efektif dalam Implementasi Program Sosial: Studi pada Program BPS. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 14(3), 123-136.
- Setiawan, D. (2019). Pengaruh Disposisi Pelaksana terhadap Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 45-58.
- Susilo, R., & Handayani, A. (2020). Motivasi dan Dedikasi Fasilitator dalam Program Sosial. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 67-79.
- Sutanto, T., & Rachmawati, E. (2020). Tantangan Sumber Daya Manusia dalam Program

Bantuan Sosial: Pendekatan Sistematis pada Pelaksanaan Program BSPS. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 10(4), 157-169.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Wahyuni, R., & Supriatna, D. (2022). Analisis Pembiayaan Program BSPS dan Implikasinya terhadap Keberhasilan Pembangunan Perumahan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 19(1), 34-49.

Wahyudi, A. (2021). Penerimaan Masyarakat terhadap Program Kebijakan Sosial di Pedesaan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 18(3), 34-46.

Widodo, P., & Jati, S. (2021). Kendala Sumber Daya dan Birokrasi dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). *Jurnal Pembangunan Daerah dan Kebijakan Publik*, 15(2), 78-89.